

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN KETRAMPILAN UNTUK PEKERJA ANAK
DI KOTA SEMARANG (Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor
560.05/0289)**

Oleh: Sisca Noviasari, Zainal Hidayat, Ari Subowo.

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Skill Training Programs for Child Labour is one of the program created by Department of Labor and Transmigration in accordance with the Mayor regulation number 560.05 / 0289 about the plan of the removal of forms work worst of a child (RAK PBPTA) were intended for workers children under the age with the aim for improving knowledge and skill for workers children to increase their family economic and detached from their work worst. The number of child labor within Semarang City keep increasing every year, they generally work that jeopardize mental, physical and their own health. Children are entitled to a wide opportunity for the growth optimally both physically, mentally, science and social because children have an important role for the city of Semarang in the future. The literature review underlying this research uses George Edward III theory. The research method used is qualitative research method. Analysis using taxonomic analysis techniques.

The result show that the implementation of Skill Training Programs for Child Labour in Semarang not yet optimally. It was apparent from three stage process of the implementation covering the first phase , the second phase and the third phase. It marked a little number of child labor who joined the skills training programs, the number of equipment training inadequate to include all child labor, availability of human resources, and the funds that are not enough, the use of a method of a bad for the program, volition implementor also weak, and no further action after the child gets the training. Based on this research, then need for structured socialization mechanisms and schedules, additional funding for facilities and human resources resources comparable to the number of child laborers, in-class replacement methods to outclasses, the establishment of specialized teams of skills training programs from the first to third stage, coordination with government agencies other or private parties related to subsequent action after the child has a skill training program.

Keywords: Implementation, communication, disposition, resources, organization structure

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak anak yang tidak terpenuhi menyebabkan munculnya anak-anak dibawah umur yang bekerja atau disebut dengan pekerja anak. Alasan mereka terjerumus kedalam status sebagai pekerja anak karena faktor ekonomi.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak pekerja anak. Sehingga Indonesia menjadi anggota ILO dan wajib bagi Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU No 20 Th 1999 dan Konvensi ILO No 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan BPTA dengan UU No 1 Th 2000.

Sebagai salah satu kota yang memiliki kegiatan industri terbanyak karena letaknya yang strategis, Kota Semarang berpotensi terjadi dan meningkatnya pekerja anak. Dilihat dari data Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang bahwa pada tahun 2009 jumlah pekerja anak ada 169 anak, lalu jumlahnya meningkat pada tahun 2013 yakni 269 pekerja anak, pada tahun 2014 jumlahnya menurun namun tidak signifikan dengan jumlah 225 pekerja anak. Oleh karena itu, pemerintah kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang No 560.05/0289 tentang Rencana Aksi Penghapusan BPTA sebagai payung hukum untuk menjalankan program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak. Program tersebut sebagai program untuk menghapus masalah pekerja anak di Kota Semarang.

B. TUJUAN

1. Mendeskripsikan Implementasi Program Pelatihan Ketrampilan untuk Pekerja Anak di Kota Semarang
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pelatihan Ketrampilan untuk Pekerja Anak di Kota Semarang

C. TEORI

I. Adiministrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik.

Administrasi publik menurut Barton dan Chappel sebagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Disini melibatkan personil dalam melayani publik.

II. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut James Anderson adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan atau maksud yang dipilih dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu persoalan

Kebijakan publik menurut George C Edwards III adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

III. Implementasi Publik

Van Meter Van Horn (1975) mengemukakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (dalam buku Leo Agustino, 2008:139).

IV. Model Implementasi

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down*. Didalam implementasi suatu kebijakan, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat.

D. METODE PENELITIAN

I. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel pada saat penelitian dilakukan.

II. Situs Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak. Sehingga lokus yang diambil adalah Disnakertrans Kota Semarang, Kelurahan Rowosari, Kelurahan Peterongan, LSM Tenaga Pelatih, Pekerja Anak

III. Subjek Penelitian

Jumlah informan disini bisa sedikit atau bisa banyak tergantung dari

perkembangan di lapangan. *Key informan* disini adalah Kasie Pengawasan Norma Kerja Disnakertrans, Staff Pengawasan Norma Kerja Disnakertrans, Kasie Kesos Kelurahan Rowosari, Kasie Kesos Kelurahan Peterongan, LSM Tenaga Pelatih, Pekerja Anak.

IV. Fenomena Penelitian

1. Proses Implementasi

Proses implementasi program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak sesuai dalam RAK PBPTA Lampiran 1 Peraturan Walikota No 560.05/0289 tentang Peran dan Tanggung jawab, antara lain :

- 1) Mengumpulkan dan menyebarluaskan data serta informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Indikator : tersedianya data pekerja anak di wilayah Kota Semarang; sosialisasi tentang BPTA
- 2) Pemberian pelatihan serta upaya rehabilitasi dan integrasi program. Indikator : adanya rapat koordinasi anggota dalam integrasi program; penarikan pekerja tidak kembali ke BPTA
- 3) Pengkoordinasian penarikan terhadap pekerja anak serta melakukan upaya agar mereka tidak kembali pada BPTA. Indikator : terlaksananya koordinasi penarikan anak-anak dari tempat kerja terburuk

2. Faktor Penentu Implementasi

1) Komunikasi

Indikator yang digunakan adalah :

- a) Intensitas sosialisasi keikutsertaan keikutsertaan kelompok sasaran dalam program pelatihan ketrampilan
- b) Gambaran Pelaksanaan komunikasi yang terjalin antara implementor dengan kelompok sasaran
- c) Resistensi kelompok sasaran terhadap keikutsertaan dalam program pelatihan ketrampilan

2) Sumber Daya

Indikator yang digunakan adalah :

- a) Sumber Daya Manusia : Jumlah pelaksana program pelatihan ketrampilan yang ada dilapangan, baik dari Disnakertrans, pihak pelatih dan pihak Kelurahan
- b) Sumber Daya Fasilitas : ketersediaan fasilitas untuk mendukung tiap pekerja anak saat melakukan pelatihan
- c) Sumber Daya Finansial : Jumlah dana yang tersedia dalam program pelatihan ketrampilan. Apakah alokasi anggaran sudah sesuai atau belum

mencukupi pelaksanaan program.

3) Disposisi

Indikator yang digunakan adalah :

- a) Respon implementor terhadap kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya
- b) Pemahaman implementor terhadap isi kebijakan
- c) Nilai dan sikap yang dimiliki implementor

4) Struktur Birokrasi

Indikator yang digunakan adalah :

- a) Adanya standar operasional prosedur bagi pelaksana kebijakan
- b) Ketepatan tugas dan pook fungsi lembaga-lembaga pemerintah pelaksana program

V. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti berupa Kata-kata dan tindakan, Sumber Tertulis, Foto, Statistik

VI. Sumber Data

Simber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder

VII. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi

VIII. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi, Sajian data, Penarikan Kesimpulan

IX. Kualitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Pemeriksaan Triangulasi

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak ini berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai pelaksanaan program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak adalah faktor penentu implementasi pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak dari tahap awal hingga tahap akhir di Kota Semarang disebabkan oleh empat variabel yaitu komunikasi sudah ditransferkan ke kelompok sasaran dengan baik namun tidak semua implementor mengkomunikasikan dengan jelas dan konsisten terhadap kelompok sasaran. Sumber daya yang kurang di staff yang tidak sebanding dengan jumlah titik usaha, luas wilayah Kelurahan, jumlah pekerja anak yang dilatih, kemudian fasilitas yang sangat kurang memadai, serta terbatasnya anggaran didalam pelaksanaan program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak. Sementara itu di variabel disposisi bahwa tidak semua Kelurahan implementor melaksanakan identifikasi yang sudah ditetapkan oleh Disnakertrans dan tidak semua implementor proaktif, kreatif dalam kegiatan sosialisasi di wilayahnya. Sedangkan dari variabel struktur birokrasi bahwa tidak adanya lembaga swasta atau instansi pemerintah yang dibentuk untuk turut serta dalam tahap ketiga yaitu kegiatan kelanjutan pasca anak mendapatkan pelatihan.

B. Analisis

1. Implementasi Program Pelatihan Ketrampilan Untuk Pekerja Anak di Kota Semarang

1) Mengumpulkan dan menyebarluaskan data serta informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

a) Tersedianya data pekerja anak di wilayah Kota Semarang

Hasil penelitian, untuk mendapatkan data pekerja anak mulai dari jumlah dan data diri maka Kelurahan harus mengidentifikasi secara keseluruhan mulai dari usaha taraf kecil hingga industri taraf besar. Dimaksudkan agar semua pekerja anak dapat diketahui tanpa ada sisa sehingga dalam menghapus masalah pekerja anak lebih mudah. Namun tidak semua Kelurahan yang ditunjuk sebagai implementor dalam tahap pertama ini melakukan identifikasi karena data dari Dinas bahwa ada Kelurahan yang tidak menyetorkan data pekerja anak di wilayah mereka.

b) Sosialisasi tentang BPTA

Hasil penelitian, sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi bahayanya larangan bekerja dibawah umur dan sosialisasi mengenai ajakan untuk mengikuti program pelatihan ketrampilan. Sosialisasi ini tidak memiliki sistem yang pasti dari Disnakertrans, namun masing-masing Kelurahan

harus proaktif bisa melakukan inisiatif dan kreatif bagaimana melakukan sosialisasi. Ditemukan sebagian implementor yang sudah melakukan identifikasi dan berhasil membawa pekerja anak ke pelatihan ketrampilan melakukan treatment bekerjasama dengan RT/RW saat melakukan sosialisasi, mendatangi rumah pekerja anak, kemudian sosialisasi juga ke anak-anak yang putus sekolah tapi belum bekerja untuk mengurangi lonjakan jumlah pekerja anak dan mendekati orangtua pekerja anak tersebut. Namun sangat disayangkan ada beberapa Kelurahan dengan jumlah pekerja anak yang sangat tinggi yaitu 92 anak tidak melakukan sosialisasi secara baik. Sehingga tidak ada satupun pekerja anak yang mengikuti program pelatihan ketrampilan.

2) Pemberian Pelatihan serta upaya rehabilitasi dan integrasi program

a) Adanya rapat koordinasi anggota dalam integrasi program

Hasil penelitian, data peserta pelatihan dipegang maka langkah selanjutnya yang dilakukan Disnakertrans adalah melaksanakan pelatihan ketrampilan. Namun sebelum melaksanakan pelatihan sesuai dengan indikator bahwa Disnakertrans harus melakukan rapat koordinasi

untuk integrasi program. Dalam rapat ini Disnakertrans bisa menentukan jenis ketrampilan apa yang akan diadakan dengan melihat berbagai sisi dan siapa yang akan melatihnya. Namun tidak adanya rapat koordinasi yang intens, dilakukan hanya sesempatnya saja jika ada waktu. Sehingga jenis ketrampilan yang diadakan tidak sesuai dengan keinginan bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pekerjaan pekerja anak, hal ini juga terjadi karena pemikiran Dinas bahwa dengan dana yang terbatas maka jenis ketrampilan pun seadanya.

b) Penarikan pekerja tidak kembali ke BPTA

Hasil penelitian, berlangsungnya pelatihan ketrampilan bertujuan agar anak betah dalam mengikuti pelatihan dan tidak kembali ke pekerjaannya. Sehingga Disnakertrans harus menciptakan pelatihan ketrampilan dalam kondisi yang baik (cukupya peralatan, tepatnya waktu pelatihan dan tepatnya metode yang digunakan) agar anak merasa tidak sia-sia, nyaman, ikhlas, tertarik dalam mengikuti pelatihan. Namun senyatanya, peralatan saat dilapangan sangat kurang sehingga peserta harus dibagi secara kelompok besar berisi 7-10 anak dalam satu kelompok, Waktu

diadakannya pelatihan hanya 4 hari. Waktu yang ditawarkan sangat singkat Ini dirasa kurang optimal bagi anak-anak mencerna materi dan praktek pelatihan, dan metode yang digunakan adalah pembelajaran in-class, artinya pembelajaran dari teori dan praktek dilakukan didalam kelas saja tanpa adanya praktik atau aplikasi di masyarakat luar. Sehingga anak mudah merasa bosan.

3) Pengkoordinasian penarikan terhadap pekerja anak serta melakukan upaya agar mereka tidak kembali pada BPTA

a) Terlaksananya koordinasi penarikan anak-anak dari tempat kerja terburuk

Hasil penelitian, Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pendampingan dan pembinaan terhadap anak agar mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka tidak kembali lagi ke pekerjaan mereka lagi. diberi pendampingan kembali untuk merencanakan usaha apa yang akan dirintis lalu pemberian bantuan modal. Disnakertrans tidak melakukan upaya koordinasi penarikan anak-anak dari BPTA, sehingga dikatakan dengan jelas bahwa tahap ketiga ini dikatakan tidak berhasil. Padahal Koordinasi itu bisa dilakukan seperti bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti BLKI,

Dinas UMKM dan lembaga swasta seperti home industri

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pelatihan Keterampilan Untuk Pekerja Anak di Kota Semarang

1) Komunikasi

Proses komunikasi dapat dilihat dari : intensitas sosialisasi keikutsertaan kelompok sasaran dalam program pelatihan ketrampilan, gambaran komunikasi yang terjalin antara implementor dengan kelompok sasaran, resistensi kelompok sasaran dalam mengikuti program pelatihan

Hasil Penelitian, komunikasi yang dilakukan implementor ke kelompok sasaran sudah cukup baik. Namun tidak semua implementor melakukan sosialisasi secara intens, implementor yang melakukan komunikasi yang intens dan pendekatan secara terus menerus secara konsisten dengan pekerja anak dan keluarga akan memunculkan rasa kekeluargaan sehingga dapat dengan mudah mentransmisikan tujuan dan maksud program, ditambah lagi bahasa yang digunakan mengalami perubahan dari penggunaan bahasa formal menjadi bahasa yang selengek-an dan gaul saat menghadapi pekerja anak. Bahasa yang mengikuti pola bicara pekerja anak yang terkesan selengek-an justru membuat kejelasan pada maksud sosialisasi tersebut sehingga pekerja anak lebih mudah memahami.

- 2) Sumber Daya
Sumber Daya saat implementasi program pelatihan ketrampilan, sumberdaya dikategorikan menjadi sumber daya manusia (jumlah pelaksana program pelatihan ketrampilan, baik dari Disnakertrans, Tenaga Pelatih, dan kelurahan), sumber daya fasilitas (ketersediaan peralatan untuk mendukung tiap pekerja anak) dan sumber daya finansial (jumlah dana yang tersedia. Alokasi anggaran sudah cukup atau justru kurang)
Hasil penelitian, anggaran seringkali tidak cair dari pemerintah daerah, walaupun cair seringkali terlambat sehingga mengakibatkan kinerja implementor juga terlambat. Kemudian ketersediaan implementor pada tahap identifikasi dan sosialisasi tidak sebanding dengan jumlah titik-titik usaha dan luas wilayah Kelurahan, saat pelaksanaan pelatihan kurangnya tenaga ahli untuk mendampingi peserta dalam mengeksekusi ketrampilan, dan kurangnya alat pembuatan kue hanya ada 10 mix, pembuatan sabun hanya 3 itupun ada yang tidak berfungsi dan alat peraga pijat refleksi hanya ada 5
- 3) Disposisi
Banyaknya tantangan yang dihadapi implementor dapat menggambarkan respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman implementor terhadap isi kebijakan dan sikap yang dimiliki implementor.

Hasil penelitian, semua implementor mengerti akan isi kebijakan namun tidak semua implementor dapat komit dan loyal melaksanakan program pelatihan ketrampilan dari tahap awal sampai tahap akhir. Ada implementor yang justru menganggap tugas tersebut tidak penting dilakukan karena ada tugas lain yang lebih penting untuk dilakukan. Namun juga ada implementor yang memiliki komitmen penuh dalam menghapus masalah pekerja anak di wilayah mereka dengan melakukan sosialisasi secara intens dan meluas, melakukan pendekatan dengan pekerja anak bahkan melibatkan ujung tombak pemerintah yang lebih kecil.

- 4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dapat dilihat dari dua hal yaitu mekanisme berupa SOP yang jelas dan struktur organisasi pelaksana. Hasil penelitian, sebenarnya secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan program pelatihan sudah tertata dengan baik dari dimulai dari tahap awal adanya identifikasi lalu data terkumpul, setelah data pekerja anak terkumpul dilakukan sosialisasi, setelah itu terkumpulnya data peserta pelatihan. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu adanya rapat integrasi program dan pelaksanaan pelatihan. Kemudian sampai pada tahap ketiga yaitu adanya kegiatan lanjutan seperti pendampingan pembinaan bagi pekerja anak. Namun tidak ada Standar Prosedurnya adalah sosialisasi.

Kelurahan dituntut untuk melakukan sistem sosialisasi secara sendiri. Hal ini sebenarnya ada sisi positifnya yaitu menggerakkan masyarakat agar lebih proaktif dan kreatif. Sedangkan sisi negatifnya adalah tidak semua Kelurahan “welcome” dengan program tersebut, karena program tersebut dirasa sangat menyusahkan. Kemudian masalah struktur Organisasi dalam program ini tidak kompleks karena tidak adanya tim/kelompok/instansi/organisasi dalam tahap ketiga. Kalau memang dirasa sangat memberatkan tugas Disnakertrans seharusnya mereka menggandeng lembaga yang dapat membina dan membimbing pekerja anak yang telah mengikuti pelatihan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Pelatihan Ketrampilan Untuk Pekerja Anak Di Kota Semarang

Proses implementasi Program Pelatihan Ketrampilan di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan baik.. Hal ini terlihat dari kegiatan pada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena masih banyaknya Kelurahan yang tidak melakukan identifikasi pekerja anak di setiap usaha kecil hingga besar, tidak ada standar ataupun ketentuan sosialisasi yang ditetapkan oleh Dinas kepada Kelurahan sebagai implementor, waktu pelaksanaan pelatihan yang hanya empat hari, metode in-class yang digunakan saat pelaksanaan

pelatihan kurang tepat yang mengakibatkan anak merasa bosan. Walaupun diadakan program pelatihan ketrampilan tersebut, namun tiap tahunnya jumlah pekerja anak tetap meningkat, yaitu pada Tahun 2009 berjumlah 169 pekerja anak di 50 Kelurahan periode pertama yang mendapat giliran, meningkat pada Tahun 2013 berjumlah 269 pekerja anak di 50 Kelurahan berbeda dari periode pertama, dan Tahun 2014 berjumlah 225 pekerja anak di 50 Kelurahan. Hal ini juga disebabkan karena tidak diadakannya kegiatan berkelanjutan setelah anak selesai mendapat pelatihan ketrampilan sebagai upaya pendampingan dan pembinaan usaha yang akan dilaksanakan oleh anak tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pelatihan Ketrampilan Untuk Pekerja Anak di Kota Semarang

1) Komunikasi

Dengan proses dari beberapa kali sosialisasi yang dilakukan oleh sebagian Kelurahan terlihat perkembangan komunikasi yang berjalan dengan baik menyesuaikan pola bicara pekerja anak yang cenderung selengek-an. Pemilihan bahasa yang mudah ditangkap oleh pemikiran anak kecil. Namun tidak semua implementor melakukan sosialisasi dengan intens, hanya sekedar sosialisasi melakukan tugas, tidak ada trik atau treatment khusus untuk mengajak pekerja anak mengikuti pelatihan.

2) Disposisi

Komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan dapat

dikatakan cukup bagus, namun dalam prakteknya masih terdapat petugas petugas pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Sisi bagusnya karena adanya implementor yang dapat diterimanya implementor di tengah masyarakat khususnya pekerja anak. Cara yang dilakukan implementor adalah fokus dan intens akan kemauan bekerja tidak menyerah dengan terus mendekati mereka secara perlahan, mencoba merangkul yang menyangkut kehidupan pekerja dan menjadikan hubungan mereka seperti keluarga.

3) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia belum sebanding dengan apa yang dibutuhkan. Ketersediaan implementor saat identifikasi dan sosialisasi, belumlah cukup untuk mengakomodir wilayah yang cukup luas dan tempat usaha yang beragam, tidak hanya itu kurangnya tenaga ahli dalam memberikan pelatihan karena tidak sebanding dengan jumlah pekerja anak yang dilatih. Kemudian sumber daya berupa anggaran yang sangat kurang karena anggaran yang diajukan Dinas tidak cair yang menyebabkan 4 tahun pelaksanaan program pelatihan ditunda dan pembelian alat tidak banyak. Ketersediaan fasilitas penunjang berupa peralatan pelatihan juga sangat terbatas.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang menjadi sorotan adalah tidak semua lembaga pemerintah maupun

swasta tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan program pelatihan ketrampilan dari tahap pertama sampai tahap akhir sebagai upaya pengentasan masalah pekerja anak.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan dana atau anggaran agar peralatan tersedia dan tenaga pelaksana menjangkau jumlah pekerja anak, wilayah, dan titik-titik usaha. Kemudian penggantian metode in-class menjadi metode outclass
2. Dibentuk tim khusus program pelatihan ketrampilan untuk pekerja anak dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Dan adanya koordinasi dengan pihak swasta seperti home industri atau dengan instansi pemerintah lainnya dibidang ekonomi seperti Dinas UMKM
3. Perlu adanya standar dalam sosialisasi seperti mekanisme sosialisasi lebih terstruktur dan jadwal pelaksanaan sosialisasi lebih jelas dan teratur, dengan ditambahkan personil dimaksudkan agar menerapkan pola-pola khusus saat melakukan identifikasi maupun sosialisasi seperti pendekatan tidak hanya kepada pekerja anak tetapi juga kepada keluarga mereka dan penggunaan bahasa yang dapat mempengaruhi mereka dan melibatkan keaktifan ujung tombak paling bawah seperti RT/RW atau pegiat sosial dalam melakukan sosialisasi
4. Pengadaan FGD yang dilakukan oleh Disnakertrans harus lebih intens agar penentuan jenis ketrampilan dapat dihasilkan dengan tepat. Kemudian memberikan apresiasi kepada Kelurahan sebagai implementor yang

berhasil mengidentifikasi dan mengajak pekerja anak di wilayah mereka untuk mengikuti program. Apresiasi itu tidak hanya berupa uang namun juga penghargaan yang dipublikasikan. Dengan cara itu, agar setiap Kelurahan termotivasi dan semangat dalam melakukan penghapusan pekerja anak di wilayah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2007. *PRINSIP-PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN NEGARA*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, teori dan Isu*. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.rev. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.rev. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2010. Semarang: FISIP UNDIP
- Subarsono. 2011. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Non Buku

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 560.05/0289 tentang Rencana Aksi Kota Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAK-PBPTA) di Kota Semarang
- Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang